



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Agats, Oktober 2025



PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 50 TAHUN 2025



TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026



- SALINAN -

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2012 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Asmat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 48);
27. Peraturan Bupati Asmat Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
BAB V : Penutup.

Pasal 3

Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 8 Oktober 2025

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 8 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
PIHAK KERALA BAGIAN HUKUM,



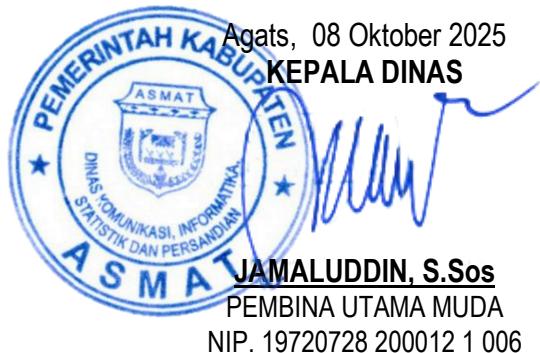
KHAIRIYAH, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 19801218 200605 2 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat Rahmat, Taufiq dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan acuan proses penyusunan anggaran tahun 2026. Renja ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan serta akan memberikan target (*quantitative objectives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam tahun yang berkenan. Pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2026 akan memberikan dampak nyata untuk pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2026.

Dokumen RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2026 dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat serta mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Asmat demi Asmat yang lebih baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematikan Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu (n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (n-1) dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan Capaian Output Kegiatan pada Tahun 2023 yang Dilengkapi Dengan Visual Hasilnya	9
2.2 Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator yang Ditentukan Dalam SPM Maupun Indikator Kinerja Utama	33
2.3 Sumber Daya SKPD	41
2.4 Prestasi yang Dicapai pada Tahun 2024	48
2.5 Isu-isu Penting/Strategis Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI	60
2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD yang Berisi Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD Dengan Analisis Kebutuhan	63
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	81
3.1 Telahaan Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait Dengan TUPOKSI Perangkat Daerah	81
3.2 Tujuan, Target dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	82
3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	83
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	85
4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disertai Target Kinerja dan Pendanaan	85
4.2 Penelaan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Yaitu Hasil Kajian Terhadap Program/Kegiatan yang Diusulkan Para Pemangku Kepentingan (Termasuk Penelaahan Dari Arahan Bupati da Hasil Reses/Aspirasi DPRD)	99

BAB V. PENUTUP	100
5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian	100
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	100
5.3 Rencana Tindak Lanjut	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Asmat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asmat.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) OPD. RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penyusunan RENJA OPD dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan RENJA OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) OPD.

RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada RENSTRA OPD. RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). RENJA OPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD, RENSTRA OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun RENJA OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target RENSTRA OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. RENJA OPD mempunyai fungsi penting

dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang RENJA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2026 lebih konkret dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta mengacu kepada RKPD tahun berkenaan;
2. Program dan kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;
3. Penyusunan rencana kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2026 yang memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2026 didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730)
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Asmat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
30. Peraturan Bupati Asmat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Bupati Asmat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 48);
32. Peraturan Bupati Asmat Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2026;

33. Peraturan Bupati Asmat Nomor 50 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rancangan RENJA-OPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2026 adalah :

1. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan ke depan setelah dievaluasi;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
3. Sebagai bahan masukan atau landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2026.

Sementara tujuan disusunnya RENJA-OPD adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran 2026;
2. Menjadikan pedoman program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang direncanakan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika rancangan RENJA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2026, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas RENJA, proses penyusunan RENJA, keterkaitan antara RENJA dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan RENJA K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu (n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (n-1) dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan Capaian Output Kegiatan pada Tahun 2024 yang Dilengkapi Dengan Visual Hasilnya

Perangkat Daerah dengan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator yang Ditentukan Dalam SPM Maupun Indikator Kinerja Utama

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan IKK.

2.3 Sumber Daya SKPD

Memuat deskripsi mengenai sumber daya manusi dan aset untuk menunjang pelayanan perangkat daerah

2.4 Prestasi yang Dicapai pada Tahun 2024

Memuat gambaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

2.5 Isu-isu Penting/Strategis Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD yang Berisi Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD Dengan Analisis Kebutuhan

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait Dengan TUPOKSI Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA perangkat daerah.

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disertai Target Kinerja dan Pendanaan

Uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:

- Jumlah program dan kegiatan;
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
- Total kebutuhan dana/PAGU indikatif yang terini menurut sumber pendanannya;
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, PAGU Indikatif maupun kombinasi keduanya.

4.2 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan MUSRENBANG.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Baik dalam rangka pelaksanannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Memberikan arahan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun ke depan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu (n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (n-1) dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan Capaian Output Kegiatan pada Tahun 2024 yang Dilengkapi Dengan Visual Hasilnya.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat di tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Asmat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asmat.

Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat memperoleh Anggaran Operasional dari DPA dan DPPA mengelolah anggaran sebesar Rp. 7.149.171.898,00 yang terdiri dari 2 (dua) komponen belanja utama yaitu:

1. Belanja Operasi:

- Belanja pegawai yang dikelola sebesar Rp. 2.989.441.404,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp 2.730.490,939,00 atau 91,34%;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.159.730.494,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp 3.516.776.035,00 atau 84,54%.

2. Belanja Modal:

- Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 138.616.575,00 dengan realisasi sebesar 132.199.710,00 atau 95,37%;
- Belanja modal gedung dan bangunan dikelola sebesar Rp. 541.277.800,00 dengan realsisasi sebesar Rp. 541.000,00 atau 99,95%.

Dari anggaran sebesar Rp 7.829.066.273,00 dengan realisasi per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 6.920.466.648,00 maka sisa anggaran sebesar Rp 1.538.599.625,00 atau 88,39%.

TABEL T-C. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KABUPATEN ASMAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat DaerahTahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ASMAT									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSA PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA									
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja								
2.16.01.2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisa Kinerja SKPD	15 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	15 Laporan	100
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksnaan Dokumen Keuangan								
2.16.01.2.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	219 Orang	64 Orang	31 Orang	31 Orang	100	21 Orang	116 Orang	52,97
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat DaerahTahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Perangkat Daerah										
2.16.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-						
2.16.01.2.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	48 Bulan	80,00
2.16.01.2.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	48 Bulan	80,00
		Tersedianya Logistik Kantor	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	48 Bulan	80,00
		Tersedianya makanan dan minum rapat	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	48 Bulan	80,00
2.16.01.2.0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan OPD	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	48 Bulan	80,00
2.16.01.2.0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	48 Bulan	80,00
2.16.01.2.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi	85 Orang	36 Orang	16 Orang	16 Orang	100	8 Orang	60 Orang	70,59
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang milik Daerah								
2.16.01.2.0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	3 Unit	29 Unit	322
2.16.01.2.0709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	2 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	100
2.16.01.2.0710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	7 Unit	46,67
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	48 Bulan	80,00
2.16.01.2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	48 Bulan	80,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat DaerahTahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	0 Paket	0 Paket	0,00
2.16.01.2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Jasa Kebersihan Kantor dan Terbayarnya Honorarium Tenaga Harian Lepas	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	48 Bulan	80,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								
2.16.01.2.0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Penyediaan Jasa dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0 Bulan	40,00
2.16.01.2.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan Mesin Kantor	11 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	8 Kegiatan	72,73
2.16.01.2.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	0 Paket	0 Paket	0,00
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersedianya Akses Komunikasi dan Informasi di Seluruh Wilayah								
2.16.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah								
2.16.02.2.0101	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	95 Titik	53 Titik	35 Titik	0 Titik	00,00	35 Titik	130 Titik	
2.16.02.2.0102	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Stabilitas Jaringan Komunikasi	170 Titik	0 Titik	15 Titik	10 Titik	66,67	42 Titik	52 Titik	30,59
2.16.02.2.0103	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah								
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah								
2.16.02.2.0105	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	130 OPD	26 OPD	26 OPD	0 OPD	0,00	26 OPD	78 OPD	60,00
2.16.02.2.0106	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik	22 Distrik	10 Distrik	15 Distrik	0 Distrik	0,00	0 Distrik	10 Distrik	45,45
		Terlaksananya informasi Pemerintah Daerah melalui Website kabupaten yang Transparan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat DaerahTahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.0107	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Pembuatan Media Massa/Buletin Musrenbang Kabupaten			26 Tabloid	26 Tabloid	100			
2.16.02.2.0108	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Terbangunnya Sinergitas antar OPD dalam melaksanakan Pengaduan Publik								
2.16.02.2.0109	Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya kegiatan manajemen krisis antar OPD	-							
2.16.02.2.0110	Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik	Teredianya Jaringan Internet yang memadai	1.250 Mbps	100 Mbps	250 Mbps	50 Mbps	20	50 Mbps	200 Mbps	16,00
		Terlatihnya Aparatur Dalam Bidang GIS	-							
		Terlatihnya petugas PIC	-		4 Orang	4 Orang	100			
		Meningkatnya Pengetahuan Aparatur/Masyarakat Dalam Bidang Desain	-							
2.16.02.2.0111	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah								
2.16.02.2.0112	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-							
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya Program Aplikasi Informatika								
2.16.03.2.01	Pengelolaan Domain yang Telah Dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Domain yang Telah Dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat								
2.16.03.2.013	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terpeliharanya kondisi jaringan WAN	130 OPD	52 OPD	26 OPD	26 OPD	100	26 OPD	104 OPD	80,00
		Terbangunnya jaringan backupan WAN dengan sistem microwave	-							
		Terlatihnya apparatur dalam bidang jaringan	-	6 Orang	5 Orang				11 Orang	
		Terlatihnya apparatur teknis pengelolaan radio	-	4 Orang	4 Orang				8 Orang	
2.16.03.2.02	Pengelolaan eGoverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya eGoverment dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Asmat								
2.16.03.2.0203	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data	-	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat DaerahTahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah	Pemerintah Daerah								
2.16.03.2.0205	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi	-	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	0 Orang	0 Orang	0,00
2.16.03.2.0211	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengelolaan GCIO	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral								
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Meta Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat								
2.20.02.2.0101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	38 Orang	0 Orang	5 Orang	5 Orang	100	4 Orang	0 Orang	23,68
2.20.02.2.0102	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60 OPD	12 OPD	25 OPD	0 OPD	0,00	0 OPD	0 OPD	0,00
2.20.02.2.010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral								
2.20.02.2.0103	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Metadata Statistik Sektoral	34 Dokumen	15 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100	15 Dokumen	56 Dokumen	164,71
2.20.02.2.0104	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	60 Orang	0 Orang	Orang	0 Orang	0,00	26 Orang	26 Orang	43,33
2.20.02.2.010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terselenggaranya Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	120 Buku	0 Buku	30 Buku	0 Buku	0,00	0 Buku	0 Buku	0,00
2.21	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terlaksananya penyelenggaraan persandian guna pengamanan informasi								
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah									
2.21.02.2.0101	Penetapan Kebijakan Tata Kelola	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata	8 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	2 Kegiatan	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat DaerahTahun (n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.21.02.2.0102	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengeloaan Sumber daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	9 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	2 Laporan	22,22
2.21.02.2.0103	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Pengamanan Informasi di Era Digital	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	1 Laporan	0,00
		Terlaksananya Sosialisasi Peran Persandian Dalam Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
2.21.02.2.0104	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintah daerah	31 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	0,00	0 OPD	0 OPD	0,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.21.02.2.0201	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	34 Orang	2 Orang	26 Orang	26 Orang	100	9 Orang	37 Orang	108,82

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (TRIWULAN I DAN II)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)					
		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		7,655,554,5 75	123,389,8 81		1,052,662,2 09		-	-	-	-	-	2,099,485,9 68
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, dan tertib administrasi OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		5,658,284,0 00	123,389,8 81		1,052,662,2 09		-	-	-	-	-	1,816,460,5 31
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15,000,000			35,797,261		-	-	-	-	-	35,797,261
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP, SAKIP, LPPD, LKPJ	2 Lpm 15,000,000	0 Lpm -	2 Lpm 35,797,261	0 Lpm -	0 Lpr n	-	3 Lpm 35,797,261				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Dok Keuangan	4,558,100,0 00			763,144,20 9		-	-	-	-	-	1,403,552,6 50
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	55 Org 4,558,100,0 00	21 Org 640,408,4 41	21 Org 763,144,20 9	- Org -	- Org -	- Org -	- Org -	- Org -	- Org -	- Org -	1,403,552,6 50
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	400,184,00 0		42,816,00 0	89,972,045		-	-	-	-	-	132,788,04 5
		Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya Peralatan dan	12 Bln 60,000,000	- Bln -	6 Bln 3,544,488	- Bln -	- Bln -	- Bln -	- Bln -	- Bln -	- Bln -	- Bln -	3,544,488

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)					
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor												
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Makan dan Minum Rapat Bahan Logistik Kantor	Bln 12	120,000,00 0	3 Bln -	3 Bln 8,538,132	- Bln -	- Bln -	6 Bln 8,538,132					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya penggandaan OPD	Bln 12	10,000,000	- Bln -	6 Bln 4,772,191	- Bln -	- Bln -	6 Bln 4,772,191					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dok	10,184,000	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Org	200,000,00 0	2 Org 42,816,00 0	18 Org 73,117,234	0 Org -	0 Org -	20 Org 115,933,23 4					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah		200,000,00 0	-	-	-	-	-					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	50,000,000	0 Unit -	0 Unit -	0 Unit -	0 Unit -	0 Unit -					
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	100,000,00 0	0 Paket -	0 Paket -	0 Paket -	0 Paket -	0 Paket -					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	50,000,000	0 Unit -	0 Unit -	0 -	0 -	0 Unit -					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		440,000,00 0	80,573,88 1		126,314,00 0						206,887,88 1	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bln 12	30,000,000	3 Bln 1,400,000	3 Bln 3,094,000	- Bln -	- Bln -	6 Bln 4,494,000					

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln 100,000,00	3 Bln 8,173,881	3 Bln 16,900,000	- Bln -	- Bln -	6 Bln 25,073,881					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln 10,000,000.00	0 Bln -	0 Bln -	0 Bln -	0 Bulan -	0 Bln -	0 Bln -				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Jasa Kebersihan Kantor dan Terbayarnya Honorarium Tenaga Harian Lepas	12 Bln 300,000,00	3 Bln 71,000,00	3 Bln 106,320,00	- Bln -	- Bln -	6 Bln 177,320,00					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		45,000,000	-	37,434,694	-	-	-	-	-	37,434,694	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyedian Jasa dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bln 5,000,000	0 Bln -	0 Bln -	0 Bln -	0 Bulan -	0 Bln -	0 Bln -				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perbaikan Peralatan Kantor	2 Unit 20,000,000	- Unit -	2 Unit 37,434,694	0 Unit -	- Unit -	2 Unit -	2 Unit 37,434,694				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Paket 20,000,000	0 Paket -	0 Paket -	0 Paket -	0 Paket -	0 Paket -	0 Paket -				
2	Meningkatnya Jaringan Komunikasi, Sumberdaya	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Tersedianya Akses Komunikasi dan Informasi di Seluruh Wilayah		1,654,910,00	-	-	-	-	-	-	-	283,025,43	
									7					

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)					
Aparatur, Pengembangan Aplikasi serta Penyebaran Informasi yang Lebih Memadai	PUBLIK													
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolaanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1,654,910,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	283,025,43 7	
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam Keg relasi media	27 Lpm	175,668,00 0	0 Lpm	-	0 Lpm	-	0 Lpm	-	0 Lpr n	-	0 Lpm	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Dist	165,542,00 0	0 Dist	-	0 Dist	-	0 Dist	-	0 Dis t	-	0 Dist	
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	3 Lpm	152,200,00 0	0 Lpm	-	0 Lpm	-	0 Lpm	-	0 Lpr n	-	0 Lpm	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundungan	3 Dist	230,000,00 0	0 Dist	-	0 Dist	-	0 Dist	-	0 Dis t	-	0 Dist	

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)					
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik (Monitoring Opini dan Aspirasi Publik) (Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah)	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	30 Titik 274,500,000	0 Titik -	0 Titik -	0 Titik -	0 Titik -	0 Titik -	0 Titik -	0 Titik -	0 Titik -		
		Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	75 Org 75,000,000	0 Org -	0 Org -	0 Org -	0 Org -	0 Org -	0 Org -	0 Org -	0 Org -		
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola Maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	27 OPD 160,000,000	27 OPD 165,363,300.00	27 OPD 49,928,000	0 OPD -	0 OPD -	0 OPD -	27 OPD 215,291,300				
		Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	5 Dok 172,000,000	-	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -		
		Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	30 Org 250,000,000	0 Org -	30 Org 67,734,137	0 Org -	0 Org -	0 Org -	30 Org 67,734,137				
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dok Survey Pembangunan Titik koordinat BTS di Ibu Kota Distrik dan Kampung	0 Titik -	0 Titik -	0 Ttk -	0 Ttk -	0 Ttk -	0 Ttk -	0 Ttk -	0 Ttk -	0 Ttk -		
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	0 Tab -	0 Tab -	0 Tab -	0 Tab -	0 Tab -	0 Tab -	0 Tab -	0 Tab -	0 Tab -		
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -	0 Dok -		

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)					
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasiakan Informasi Program atau Kebijakan	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	
3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya Aplikasi Informatika		342,360,575									
		Pengelolaan Domain Yang telah dikelola oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya Domain Yang telah dikelola oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/ Kota		90,000,000									
		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dok Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	26 Dok	90,000,000	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	
		Pengelolaan eGoverment Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya eGoverment Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		252,360,575									

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)					
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah WebSite Kabupaten Asmat	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	
		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	5 Apli	50,047,575	0 Apli	-	0 Apli	-	0 Apli	-	0 Apli	-	
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dok Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	10 Dok	50,250,000	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Apli	62,063,000	0 Apli	-	0 Apli	-	0 Apli	-	0 Apli	-	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	26 OPD	-	0 OPD	-	0 OPD	-	0 OPD	-	0 OPD	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Siistem Keamanan Informasi	Jumlah Dok Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Informasi	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30 OPD	90,000,000	0 OPD	-	0 OPD	-	0 OPD	-	0 OPD	-	
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN			331,235,00		168,080,0						168,080,00	

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	00	7	00	8	00	9	00	10=(6+7+8+9)	
		BIDANG STATISTIK			0	00							0	
4		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten		145,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran tentang Statistik Daerah		145,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	27 Dok	90,000,000	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	0 Dok	-	
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5 Data	55,000,000	Data	Data	Data	Data	Data	Data	0 Data	-	
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			186,235,000		168,080,000		-	-	-	-	168,080,000	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		186,235,000		168,080,000		-	-	-	-	168,080,000	
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Org	10 Org	41,235,000	26 Org	168,080,000	0 Org	-	0 Org	-	26 Org 168,080,000	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya kapasitas SDM bidang statistik	Keg	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	-	0 Keg	
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Percentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rilis Tepat Waktu	%	100 %	50,000,000	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dok	30 Dok	95,000,000	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			321,000,000				105,791,964				105,791,964	

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			321,000,000		-		105,791,964		-		105,791,964	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		271,000,000		-		105,791,964		-		105,791,964	
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Keg	55,000,000	0 Keg	-	2 Keg	105,791,964	0 Keg	-	0 Keg	105,791,964	
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Lap	55,000,000	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Lap	101,000,000	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	27 OPD	60,000,000	0 OPD	-	0 OPD	-	0 OPD	-	0 OPD	-	

NO	SASARAN	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ Keg (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI EVALUASI	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2025	
					I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)					
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27 Org	50,000,000	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	0 Org	-	
				8,307,789,575									2,373,357,932	

TABEL 2.2
REALISASI BELANJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ASMAT PER 31 DESEMBER 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTAS E (%)
1	2	3	4	5	6
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.978.611.032,00	3.6522.603,00	326.608.429,00	91,79
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.6450,00	33.6020,00	430,00	99,87
2.16.01.2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.6450,00	33.6020,00	430,00	99,87
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.989.441.404,00	2.730.490.939,00	258.950.465,00	91,34
2.16.01.2.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.989.441.404,00	2.730.490.939,00	258.950.465,00	91,34
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.401.426,00	348.905.548,00	6.495.878,00	98,17
2.16.01.2.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.5570,00	32.528.738,00	1.028.262,00	96,94
2.16.01.2.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	184.109.426,00	182.048.587,00	2.060.839,00	98,88
2.16.01.2.0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1410,00	13.144.223,00	856.777,00	93,88
2.16.01.2.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.7340,00	121.1840,00	2.5500,00	97,94
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.0250,00	234.750,00	20.250,00	99,91
2.16.01.2.0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.0250,00	234.750,00	20.250,00	99,91
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.598.200,00	502.934.939,00	56.663.261,00	89,87
2.16.01.2.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.5000,00	10.3600,00	1400,00	98,67
2.16.01.2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.098.200,00	54.419.939,00	34.678.261,00	61,08
2.16.01.2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46000,00	438.1550,00	21.8450,00	95,25
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.5000,00	13.063.527,00	4.436.473,00	74,65
2.16.01.2.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.5000,00	13.063.527,00	4.436.473,00	74,65
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.058.322.437,00	1.624.853.568,00	159.609.969,00	78,94

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTAS E (%)
1	2	3	4	5	6
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.058.322.437,00	1.624.853.568,00	433.468.869,00	78,94
2.16.02.2.0102	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	552.1360,00	487.213.400,00	64.922.600,00	88,24
2.16.02.2.0106	Pelayanan Informasi Publik	1.295.064.437,00	954.916.168,00	340.148.269,00	73,74
2.16.02.2.0110	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	211.1220,00	182.7240,00	28.3980,00	86,55
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.146.581.552,00	1.101.599.400,00	44.982.152,00	96,08
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.146.581.552,00	1.101.599.400,00	44.982.152,00	96,08
2.16.03.2.0103	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.146.581.552,00	1.101.599.400,00	44.982.152	96,08
2.20	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK	422.655.254,00	407.866.671,00	14.788.583,00	96,50
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	422.655.254,00	407.866.671,00	14.788.583,00	96,50
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	422.655.254,00	407.866.671,00	14.788.583,00	96,50
2.20.02.2.0101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	251.1440,00	243.020.692,00	8.123.308,00	96,77
2.20.02.2.0103	Membangun Metadata Statistik Sektoral	171.511.254,00	164.845.979,00	6.665.275,00	96,11
2.21	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAAN	222.8960,00	134.144.442,00	88.751.558,00	60,18
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	222.8960,00	134.144.442,00	88.751.558,00	60,18
2.21.02.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.7240,00	11.1080,00	53.6160,00	17,16
2.21.02.0101	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.1080,00	11.1080,00	0,00	100
2.21.02.0102	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	53.6160,00	0,00	53.6160,00	0,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	158.1720,00	123.036.442,00	35.135.558,00	77,79
2.21.02.2.0201	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	158.1720,00	123.036.442,00	35.135.558,00	77,79

Dari penyajian laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 diatas, maka untuk evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PER 31 DESEMBER 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dan perluasan lapangan pekerjaan	Meningkatnya kualitas pelayanan, dan tertib administrasi OPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan Kualitas Sarana dan Prasarana	%	100	100	100
			Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	B	BB	BB
2.	Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan telekomunikasi yang handal dan efisien	Meningkatnya jaringan komunikasi, sumber daya aparatur, pengembangan aplikasi serta penyebaran informasi yang lebih memadai	Cakupan kampung terakses jaringan telepon seluler (HP)	%	75	94,64	126,19
			Cakupan kampung terakses RRI	%	11	3,57	32,45
			Cakupan kampung TeraksesTVRI	%	16	0,00	0,00
			Jumlah stasiun radio/TV lokal yang tersedia	Stasiun	3	2	66,67
			Ketersediaan Website pemerintah daerah dan aktif	Website	1	1	100
		Meningkatnya Data Informasi Statistik Daerah	Ketersediaan buku kabupaten dalam angka	Buku	30	0	0
			Ketersediaan buku PDRB kabupaten (unit)	Buku	30	0	0
			Cakupan pendataan kualitas jaringan komunikasi di radius 25 KM	%	4,5	0	0
			Cakupan informasi data sektoral	%	20	2	10
		Meingkatkan pemanfaatan komunikasi dalam daerah	Cakupan penggunaan frekuensi radio SSB dan RIG	%	20	0	0
			Proporsi Pengetahuan tentang Persandian di Lingkungan Masyarakat	%	2,0	0	0
			Cakupan layanan SPBE dan Tanda Tangan Elektronik	%	5,5	1,03	18,37

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan peningkatan SDM dalam sandiman tingkat dasar dan lanjutan	%	35	0	0

Dari empat sasaran strategis diatas sasaran strategis 1 merupakan penunjang organisasi. Sementara sasaran strategis 2,3, dan 4 merupakan sasaran strategis utama perangkat daerah dan dalam hal ini akan yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 2:

Meningkatnya jaringan komunikasi, sumber daya aparatur, pengembangan aplikasi serta penyebaran informasi yang lebih memadai. Dimaksudkan untuk menjadi tolak ukur guna menjadi fondasi komunikasi yang lebih efektif dan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan baik.

Sasaran 3:

Meningkatnya Data Statistik Daerah.Sasaran ini dapat memberikan suatu informasi data Indeks Pembangunan Manusia dan Profil Penduduk Miskin bahkan penyebaran di wilayah yang lebih berpotensi yang sudah ditetapkan.

Sasaran 4:

Meningkatkan pemanfaatan komunikasi dalam daerah. Sasaran ini dapat memberikan suatu kemudahan dalam komunikasi antar Distrik yang belum terlayani jaringan seluler.

TABEL 2.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
						2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dan perluasan lapangan pekerjaan	Meningkatnya kualitas pelayanan, dan tertib administrasi OPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan Kualitas Sarana dan Prasarana	%	100	100	100
			Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	B	C	BB
2.	Meningkatkan pengembangan system transportasi dan telekomunikasi yang handal dan efisien	Meningkatnya jaringan komunikasi, sumber daya aparatur, pengembangan aplikasi serta penyebaran informasi yang lebih memadai	Cakupan kampung terakses jaringan telepon seluler (HP)	%	75	75	94,64
			Cakupan kampung terakses RRI	%	11	0,00	3,57
			Cakupan kampung Terakses TVRI	%	16	0,00	0,00
			Jumlah stasiun radio/TV lokal yang tersedia	Stasiun	3	2	2
			Ketersediaan Website pemerintah daerah dan aktif	Website	1	1	1
		Meningkatnya Data Informasi Statistik Daerah	Ketersediaan buku Kabupaten dalam angka (unit)	Buku	30	0,00	0,00
			Ketersediaan buku PDRB Kabupaten (unit)	Buku	30	0,00	0,00
			Cakupan pendataan kualitas jaringan komunikasi di radius 25 KM	%	5,5	0,00	0,00
			Cakupan informasi data sektoral	%	20	0,00	0,00
		Meningkatkan pemanfaatan komunikasi dalam daerah	Cakupan penggunaan frekuensi radio SSB dan RIG	%	20	0,00	2,00
			Proporsi Pengetahuan tentang Persandian di Lingkungan Masyarakat	%	2,0	0,00	0,00

		Cakupan Layanan SPBE dan Tanda Tangan Elektronik	%	5,5	0,00	1,03
		Cakupan peningkatan SDM dalam sandiman tingkat dasar dan lanjutan	%	35	0,00	0,00

Perbandingan Realisasi Kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat disajikan pada Struktur Organisasi dan Renstra 2021-2025 dimana ada target dan indikator kinerja dari sasaran strategis.

TABEL 2.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI (2024)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan ketersediaan jaringan infrastruktur dasar daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dan perluasan lapangan pekerjaan	Meningkatnya kualitas pelayanan, dan tertib administrasi OPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan Kualitas Sarana dan Prasarana	%	100	100	100
			Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	B	BB	BB
2.	Meningkatkan pengembangan system transportasi dan telekomunikasi yang handal dan efisien	Meningkatnya jaringan komunikasi, sumber daya aparatur, pengembangan aplikasi serta penyebaran informasi yang lebih memadai	Cakupan kampung terakses jaringan telepon seluler (HP)	%	80	94,64	118,30
			Cakupan kampung terakses RRI	%	13	3,57	27,46
			Cakupan kampung Terakses TVRI	%	18	0,00	0,00
			Jumlah stasiun radio/TV lokal yang tersedia	Stasiun	3	2	66,67
			Ketersediaan Website pemerintah daerah dan aktif	Website	1	1	100
		Meningkatnya Data Informasi Statistik Daerah	Ketersediaan buku Kabupaten dalam angka (unit)	Buku	30	0,00	0,00
			Ketersediaan buku PDRB Kabupaten (unit)	Buku	30	0,00	0,00
			Cakupan pendataan kualitas jaringan komunikasi di radius 25 KM	%	5,0	0	0
			Cakupan informasi data sektoral	%	23	2	8,69
		Meningkatkan pemanfaatan	Cakupan penggunaan frekuensi radio SSB dan	%	23	0	0

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI ASI (2024)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		komunikasi dalam daerah	RIG				
			Proporsi Pengetahuan tentang Persandian di Lingkungan Masyarakat	%	2,5	0	0
			Cakupan Layanan SPBE dan Tanda Tangan Elektronik	%	6,0	1,03	17,16
			Cakupan peningkatan SDM dalam sandiman tingkat dasar dan lanjutan	%	40	0	0

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD / Renstra terdapat tingkat kemajuan pada sasaran strategis mengalami peningkatan.

Dari uraian evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2023 disimpulkan bahwa sebagian besar program yang telah dilaksanakan tidak ada hambatan yang besar.

2.2. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator yang Ditentukan Dalam SPM Maupun Indikator Kinerja Utama

Dari penyajian laporan realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 diatas, maka untuk evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat untuk Tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

TABEL T-C.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ASMAT

NO	Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Catatan Analisis	
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah									
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD	Tersusunnya Laporan LAKIP, SAKIP, LPPD, LKPJ			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksnaan Dokumen Keuangan									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			35 Orang	50 Orang	50 Orang	20 Orang	31 Orang	21 Orang	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-	-	-	-	-		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

NO	Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Catatan Analisis	
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Keterangan
		Tersedianya Logistik Kantor			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
		Tersedianya makanan dan minum rapat			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan OPD			200 Lbr	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan			0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi			90 Orang	30 Orang	20 Orang	10 Orang	8 Orang	8 Orang	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang milik Daerah									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			0 Unit	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit	3 Unit	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor			1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5 Unit	5 Unit	5 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0 Paket	5 Paket	5 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	

NO	Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Catatan Analisis	
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Keterangan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium Jasa Kebersihan Kantor dan Terbayarnya honorarium tenaga harian lepas			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan Mesin Kantor			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0 Paket	3 Paket	3 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	
2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersedianya akses komunikasi dan informasi di seluruh wilayah									
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah									
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media			0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			0 Distrik	5 Distrik	5 Distrik	0 Distrik	0 Distrik	0 Distrik	
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan	Jumlah laporan Dukungan Administratif,			0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	

NO	Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Catatan Analisis	
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Keterangan
	Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika									
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Distrik	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			86 Titik	16 Titik	21 Titik	86 Titik	24 Titik	42 Titik	
	Diseminasi Informasi	% khalayak yang terpapar informasi publik			0 Orang	3 Orang	3 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Domain yang Telah Dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Asmat			26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun			0 OPD	26 OPD	26 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	
	Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik	Jumlah Jaringan Internet yang Terpasang			250 Mbps	250 Mbps	250 Mbps	50 Mbps	50 Mbps	50 Mbps	
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi yang Meningkat Kapasitasnya							3 Orang	3 Orang	
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		-								
3.1	Pengelolaan Domain Yang telah dikelola oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota				-			-			

NO	Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Catatan Analisis	
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Keterangan
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domair Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa			0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
3.2	Pengelolaan eGoverment dilingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya eGoverment dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Asmat									
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional			0 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0 Aplikasi	0 Aplikasi	
	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			26 OPD	26 OPD	26 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas			0 Distrik	2 Distrik	2 Distrik	0 Distrik	0 Distrik	0 Distrik	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral									
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Meta Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat			-			-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral			10 Orang	5 Orang	5 Orang	0 Orang	5 Orang	26 Orang	
	Peningkatan Kapasitas PEMDA Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	Terlaksananya Sosialisasi Orientasi dan Pelatihan Statistik pada Setiap OPD dan			25 OPD	25 OPD	10 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	

NO	Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Catatan Analisis	
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Keterangan
	Terintegrasi	Sekolah di Kabupaten Asmat									
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Pendataan Penggunaan Handphone Seluler Terhadap Layanan Komunikasi di Wilayah Blind Spot BTS			0 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	15 Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			0 OPD	25 OPD	25 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Tersusunnya Penyusunan Pengumpulan Data Updating Statistik Daerah			30 Buku	30 Buku	30 Buku	0 Buku	0 Buku	0 Buku	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terlaksananya penyelenggaraan persandian guna pengamanan informasi			-						
5.1	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah										
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Pengamanan Informasi di Era Digital			0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegaitan	
		Terlaksananya Sosialisasi Peran Persandian Dalam Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	

NO	Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Catatan Analisis	
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Keterangan
	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			0 Distrik	2 Distrik	2 Distrik	0 Distrik	0 Distrik	0 Distrik	
5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				-			-			
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			1 Orang	2 Orang	2 Orang	0 Orang	26 Orang	6 Orang	

2.3 Sumber Daya SKPD

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup dan handal sesuai dengan kompetensi keilmuan, khususnya dari berbagai disiplin ilmu-ilmu terkait bidang kerja sehingga diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas yang diembannya.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat
Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Oktober 2025

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	0
2.	Pegawai Negeri Sipil	17	3	20
3.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat, 2025

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat Berdasarkan Pangkat/Golongan
Per 31 Oktober 2025

NO	KEPANGKATAN / GOLONGAN	JUMLAH PNS
1.	Pembina TK.I / IV-c	1
2.	Pembina TK.I / IV-b	0
3.	Pembina / IV-a	2
4.	Penata TK.I / III-d	2
5.	Penata / III-c	4
6.	Penata Muda TK.I / III-b	4
7.	Penata Muda / III-a	4
8.	Pengatur TK.I / II-d	2
9.	Pengatur / II-c	1
10.	Pengatur Muda TK.I / II-b	0

NO	KEPANGKATAN / GOLONGAN	JUMLAH PNS
11.	Pengatur Muda / II-a	0
	<i>Total</i>	20

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat, 2025

Tabel 2.7
**Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat**
Per 31 Oktober 2025

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PTT
1.	Sekretariat	8
2.	Bidang Komunikasi dan Inforrmatika	6
3.	Bidang Statistik	2
4.	Bidang Persandian	1
	<i>Total</i>	17

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat, 2025

Tabel 2.8
**Persentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat Berdasarkan Pendidikan Terakhir**
Per 31 Oktober 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE
1.	SD / SEDERAJAT	0	0.00
2.	SLTP / SEDERAJAT	0	0.00
3.	SLTA / SEDERAJAT	4	20.00
4.	DIPLOMA	2	10.00
5.	SARAJANA (S1)	12	65.00
6.	MAGISTER (S2)	2	5.00
7.	DOKTORAL (S3)	0	0.00
	<i>Total</i>	20	100

Dari tabel tersebut di atas dapat dibaca bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir adalah S-1 Sederat yaitu 65.00% (Enam Puluh Lima Koma Nol Nol Persen), hal ini mencerminkan PNS Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat dapat dijadikan modal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian.

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sejauh ini ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat dapat dikatakan belum memadai dan masih jauh dari cukup. Gambaran sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat selanjutnya diuraikan dalam tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Aset Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat
Per 31 Oktober 2025

No	Uraian	Volume/ Satuan	Kondisi				Tahun Perolehan
			Baik	Rusak	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1 Unit	1	-	-	-	2017
2	Pembangunan Lahan Parkir	1 Unit	1	-	-	-	2023
3	Meja Kerja 1 Biro	5 Unit	5	-	-	-	2017
4	Meja Kerja 1/2 Biro	11 Unit	11	-	-	-	2017
5	Printer	1 Unit	1	-	-	-	2017
6	Papan Struktur Organisasi	1 Unit	1	-	-	-	2017
7	Lemari Arsip	5 Unit	5	-	-	-	2017
8	Kursi Pimpinan Merk Active	5 Unit	5	-	-	-	2017
9	Kursi Lipat Chitose	50 Unit	30	20	-	-	2017
10	Kursi Tamu Ligna	1 Unit	1	-	-	-	2017

No	Uraian	Volume/ Satuan	Kondisi				Tahun Perolehan
			Baik	Rusak	Rusak Ringan	Rusak Berat	
11	Komputer PC Lenovo	10 Unit	3	-	5	2	2017
12	Printer Epson L120	1 Unit	1	-	-	1	2017
13	Printer HP Laser Jet	2 Unit	-	-	1	1	2017
14	Tape Recorder Sony ICD-PX240	2 Unit	-	-	1	1	2017
15	Lemari 3 Pintu	1 Unit	1	-	-	-	2017
16	Jam Dinding Mirado Bundar	6 Unit	-	-	-	6	2017
17	Dispenser Sharp swd- 72ehl-bk	2 Unit	1	-	-	1	2017
18	Kulkas RSA	1 Unit	1	-	-	-	2017
19	Mesin Ketik Olimpia Standar	1 Unit	-	1	-	-	2017
20	Meja kerja	1 Unit	1	-	-	-	2017
21	Proyektor / Infokus Sony HDMI	1 Unit	1	-	-	-	2017
22	Televisi Sharp 40 LCD	2 Unit	2	-	-	-	2017
23	Kain Tirai Lapisan Gorden Standar	21 Buah	21	-	-	-	2018
24	Kain Gorden Standar	40 Buah	40	-	-	-	2018
25	Router Utama Datacenter CCR- 1036	2 Unit	1	-	1	-	2018
26	Switc hub Manageable layer 3 Gigabit 24 port UBI QUITI EDGE SWITH 48-150W	1 Unit	1	-	-	-	2018
27	Router Kominfo Router Board RB 3011 VIAS- RM	1 Unit	1	-	-	-	2018
28	Radio Access Point Indoor	2 Unit	1	-	-	1	2018

No	Uraian	Volume/ Satuan	Kondisi				Tahun Perolehan
			Baik	Rusak	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	UBIQUI TY						
29	Rack Server Indorack 20u	1 Unit	1	-	-	-	2018
30	Pc Untuk Monitoring Asus	1 Unit	1	-	-	-	2018
31	UPS 2000 Watt AP 990-3800	2 Unit	2	-	-	-	2018
32	Box Outdor Dan Kelistrikan Perangkat (UPS) 8U	34 Unit	34	-	-	-	2018
33	Rouster SFP Support Mikrotik RB 3001 VAS- RM	34 Unit	34	-	-	-	2018
34	Switchub Gigabit 24 Port	34 Unit	34	-	-	-	2018
35	Radio Access Point Indoor (Hotspol) D-LINK N300	34 Unit	34	-	-	-	2018
36	AC Split-LG,S 10 INV-2 HERCUL ES INVERT ER 1 PK	7 Unit	1	-	6	-	2018
37	Router SFP Support RB 3001 VAS- RM	4 Unit	2	-	2	-	2018
38	Converter FO to LAN mc 210 cs	4 Unit	2	-	1	1	2018
39	rack Server Indor 20u	1 Unit	1	-	-	-	2018
40	Buku Kajian Data Strategis	52 Buah	52	-	-	-	2017
41	Buku Laporan Penelitian Kajian Pembangunan Manusia	43 Buah	43	-	-	-	2017
42	Buku Cetak Profil Penduduk Miskin	60 Buah	60	-	-	-	2017
43	Buku Publikasi Kajian Produk Domestik Regional Bruto	60 Buah	60	-	-	-	2017

No	Uraian	Volume/ Satuan	Kondisi				Tahun Perolehan
			Baik	Rusak	Rusak Ringan	Rusak Berat	
44	Kabel Fiber Optik 48 core	3 Rol	3	-	-	-	2018
45	Kabel Fiber Optik 2 core	4 Rol	4	-	-	-	2018
46	ODP (Optical Distribution Point)	10 Unit	5	-	2	3	2018
47	OTB (Optical Termination Box)	2 Unit	1	-	1	-	2018
48	ODC (Optical Distribution Box)	3 Unit	1	-	1	1	2018
49	Fusion Spe	1 Unit	1	-	-	-	2018
50	Splicer Toolkit	1 Unit	-	-	1	-	2018
51	OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)	1 Unit	-	-	1	-	2018
52	Kabel Jaringan Cat-6	4 Doz	4	-	-	-	2018
53	Konektor Jaringan RJ- 45	10 Pak	10	-	-	-	2018
54	Kelistrikan (Kabel,Stop Kontak, Terminal , MCB)	1 Paket	1	-	-	-	2018
55	Conduit Kabel	1 Paket	1	-	-	-	2018
56	Klem Kabel Fiber Optic	1 Paket	1	-	-	-	2018
57	Labellingg Perangkat	1 Paket	1	-	-	-	2018
58	Klem Kabel LAN	1 Paket	1	-	-	-	2018
59	Pigtail Jumper Fiber Optic	1 Unit	1	-	-	-	2018
60	Switchhub	4 Doz	4	-	-	-	2018
61	Kabel Jaringan Cat-6	4 Paket	4	-	-	-	2018
62	Speed Boat	1 Doz	1	-	-	-	2018
63	Mesin Generator Listrik 60 Kva	1 Unit	-	-	1	-	2018

No	Uraian	Volume/ Satuan	Kondisi				Tahun Perolehan
			Baik	Rusak	Rusak Ringan	Rusak Berat	
64	Komputer Lenovo All In one	1 Unit	1	-	-	-	2023
65	Komputer Lenovo All In one	1 Unit	1	-	-	-	2023
66	Komputer Lenovo All In one	1 Unit	1	-	-	-	2023
67	Komputer Lenovo All In one	1 Unit	1	-	-	-	2023
68	Komputer Lenovo	1 Unit	1	-	-	-	2023
69	Printer Canon	2 Unit	1	-	1	-	2023
70	Printer Epson	4 Unit	2	-	2	-	2023
71	Kamera CCTV Sony Exview	1 Unit	1	-	-	-	2023
72	Ac Daikin	2 Unit	2	-	-	-	2023
73	Kursi Rapat Standar	1 Unit	1	-	-	-	2023
74	Kursi Rapat Standar	4 Unit	4	-	-	-	2023
75	Meja Kerja Standar	5 Unit	5	-	-	-	2023
76	Meja Rapat Standar	2 Unit	2	-	-	-	2023
77	Kursi/Bangku Standar	17 Unit	17	-	-	-	2023
78	Pembangunan Rumah Internet Untuk Masyarakat	1 Unit	1	-	-	-	2023
79	Papan Nama Kantor	1 Unit	1	-	-	-	2023
80	Meja Tamu	14 Unit	14	-	-	-	2024
81	Ac Daikin	1 Unti	1	-	-	-	2024
82	Printer Epson	2 Unit	2	-	-	-	2024
83	Lemari Arsip Kantor	3 Unit	3	-	-	-	2025
84	Printer Epson 5290	2 Unit	2	-	-	-	2025
85	Komupterr All In One (Asus)	2 Unit	2	-	-	-	2025

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat, 2025

2.5 Prestasi yang Dicapai pada Tahun 2024

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tidak mengalami perubahan nomenklatur dan perubahan struktur kelembagaan, sehingga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Asmat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat. Maka berdasarkan Pasal 465 Peraturan Bupati Asmat Nomor 33 Tahun 2016 dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, dibidang statistik dan dibidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, dibidang statistik dan dibidang persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, dibidang statistik dan dibidang persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, dibidang statistik dan dibidang persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Prestasi merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan perangkat daerah yang telah direncanakan, ditetapkan dalam sebuah program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya. Untuk itu dapat disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA perangkat daerah dan pencapaian RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan), target kinerja capaian program (RENSTRA) perangkat daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.

TABEL 2.10
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	IKK	TARGET RENSTRA SKPD RPJMD		REALISASI CAPAIAN	
			TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)	TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		-		-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan LAKIP, SAKIP, LPPD, LKPJ		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksnaan Dokumen Keuangan					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang	50 Orang	31 Orang	21 Orang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Tersedianya Logistik Kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Tersedianya Makanan dan Minum Rapat		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	IKK	TARGET RENSTRA SKPD RPJMD		REALISASI CAPAIAN	
			TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)	TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan		12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi		15 Orang	15 Orang	8 Orang	8 Orang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang milik Daerah					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor		1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 Unit	5 Unit	0 Unit	0 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium Jasa Kebersihan Kantor dan Terbayarnya honorarium tenaga harian lepas		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Penyediaan Jasa dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanaya Pemeliharaan peralatan dan Mesin Kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanaya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3 Paket	3 Paket	0 Paket	0 Paket
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	IKK	TARGET RENSTRA SKPD RPJMD		REALISASI CAPAIAN	
			TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)	TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah					
Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media		0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
Kemitraaan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraaan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		5 Distrik	5 Distrik	0 Distrik	0 Distrik
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik		3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Terselenggaranya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik		16 Titik	21 Titik	24 Titik	42 Titik
Desiminiasi Informasi	Terlaksananya Desiminiasi Informasi		3 Orang	3 Orang	0 Orang	0 Orang
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik		26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD
Penyusunan Startegi Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Startegi Komunikasi Publik		26 OPD	26 OPD	0 OPD	0 OPD
Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik	Tersedianya Jaringan Internet yang Memadai		250 Mbps	250 Mbps	50 Mbps	50 Mbps
	Terlatihnya Aparatur dalam Bidang GIS				3 Orang	3 Orang
	Terlatihnya Petugas PIC		-	-	-	-
	Menigkatnya Pengetahuan Aparatur/Masyarakat Dalam Bidang Desain		-	-	-	-
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya aplikasi informatika		-	-	-	-
Pengelolaan Domain Yang telah dikelola oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota						

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	IKK	TARGET RENSTRA SKPD RPJMD		REALISASI CAPAIAN	
			TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)	TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah	Terkelolanya Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah		5 Unit	5 Unit	0 Unit	0 Unit
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Domain yang Telah Dikelolah Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat		26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD
Pengelolaan eGoverment Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya eGoverment dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Asmat					
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		26 OPD	26 OPD	0 OPD	0 OPD
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkata Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Tersedianya Akses Internet untuk Perangkata Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE		3 Distrik	3 Distrik	0 Distrik	0 Distrik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral					
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Meta Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat		-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan , analisis dan diseminasi data statistik sektorral		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Orang	26 Orang
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Pendataan Penggunaan Hanphone Seluler terhadap layanan Komunikasi di Wilayah Blind Spot BTS		4 Dokumen	4 Dokumen	0 OPD	0 OPD
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektroal Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		15 Kampung	15 Kampung	0 Dokumen	15 Dokumen
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik		25 OPD	25 OPD	0 OPD	0 OPD
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersusunnya Penyusunan Pengumpulan Data Updating Statistik Daerah		30 Buku	30 Buku	0 Buku	0 Buku

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	IKK	TARGET RENSTRA SKPD RPJMD		REALISASI CAPAIAN	
			TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)	TAHUN 2023 (n-2)	TAHUN 2024 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terlaksananya penyelenggaraan persandian guna pengamanan informasi					
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah						
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Teaksananrya Sosialisasi Tentang Tata Kelola keamanan Informasi dan Jaringan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Sumberdaya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengeloaan Sumber daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		3 Orang	3 Orang	0 Laporan	2 Laporan
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegaitan
	Terlaksananya Sosialisasi Peran Persandian Dalam Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintah daerah		2 Distrik	2 Distrik	0 Distrik	0 Distrik
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		2 Orang	2 Orang	26 Orang	6 Orang

Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan : Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

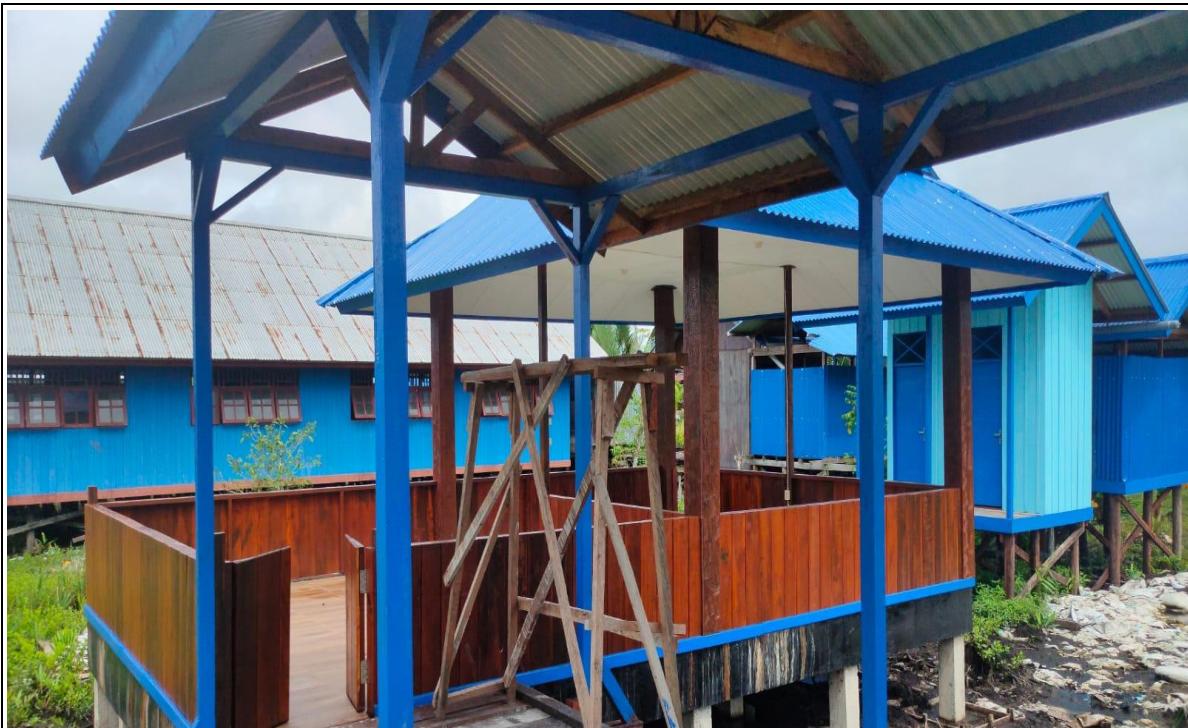


Kegiatan Monitoring BTS 4G BAKTI dan Telkomsel Kampung Biwar Darat Tahun 2024.



Kegiatan Monitoring BTS 4G BAKTI dan Telkomsel Kampung Waganu Tahun 2024.

Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik



Kegiatan Pembangunan Taman Pintar Untuk Masyarakat di Kampung Bis Agats Distrik Agats Kabupaten Asmat Tahun 2024.



Kegiatan Pembangunan Taman Pintar Untuk Masyarakat di Kampung Bis Agats Distrik Agats Kabupaten Asmat Tahun 2024.

Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik



Kegiatan Pelatihan Radio Link di Yogyakarta Tahun 2024.



Kegiatan Pelatihan Radio Link di Yogyakarta Tahun 2024.

Program	: Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan	: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah



Kegiatan Penyambungan Kabel 48 Core pada BPKAD Kab. Asmat, BAKESBANGPOL Kab. Asmat, BP4D Kab. Asmat, BKPSDM Kab. Asmat, Dinas Kesehatan Kab. Asmat, Dinas Perhubungan Kab. Asmat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Asmat, Inspektorat Kab. Asmat, Dinas Pendidikan Kab. Asmat dan Dinas Sosial Kab. Asmat Tahun 2024.



Kegiatan Pengecekan Server pada BPKAD Kabupaten Asmat Tahun 2024.

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral



Kegiatan Sosialisasi Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2024.



Kegiatan Sosialisasi Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2024.

Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kab/Kota



Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Tentang CSIRT (TTE) Di Jakarta Tahun 2024..



Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Tentang CSIRT (TTE) Di Jakarta Tahun 2024.

2.5 Isu-isu Penting/Strategis Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada. Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat. Sedangkan permasalahan pembangunan menurut urusan, sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya pembangunan BTS berdampak pada jangkauan internet
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (Smart Governance);
3. Penyediaan fiber optic belum maksimal berdampak pada pelayanan publik belum seluruhnya berbasis elektronik;
4. Masih rendahnya cakupan pelayanan telekomunikasi seluler dan internet;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan website pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informatika yang lain;
7. Belum optimalnya monitoring, pemeliharaan dan parawatan fasilitas sarana dan prasarana telekomunikasi.

Beberapa faktor internal yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain:

- Masih belum memadainya sarana dan prasarana kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai bidang tugas komunikasi informatika, penyelenggaraan *E-Government*, statistik dan persandian;
- Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sesuai dengan bidang Komunikasi dan Informatika;
- Rendahnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Masih rendahnya kualitas layanan statistik sektoral yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;

- Kurangnya pemahaman ASN tentang pentingnya persandian dan keamanan informasi.

Dalam perspektif tersebut diperlukan proses internal untuk membenahi permasalahan tersebut, disamping harus tetap fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat, yaitu :

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Asmat telah malaksanakan berbagai terobosan dalam rangka pengelolaan/penyelenggaraan komunikasi dan informatika, namun demikian masih terdapat permasalahan yang terkait dengan komunikasi dan informatika di Kabupaten Asmat, adalah:

- a. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di bidang teknik infomasi dan komunikasi;
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
- c. Belum adanya penyusunan strategi tentang komunikasi publik;
- e. Masih terbatasnya pembangunan BTS berdampak pada jangkauan internet;
- f. Penyediaan fiber optic belum maksimal berdampak pada pelayanan publik belum seluruhnya berbasis elektronik;
- g. Masih rendahnya cakupan pelayanan telekomunikasi seluler dan internet;
- h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan website pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
- i. Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

2. Urusan Bidang Penyelenggaraan E-Government

Tujuan penyelenggaraan *E-Government* adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. *E-Government* juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Asmat, adalah:

- a. Masih rendahnya indeks SPBE, pada tahun 2024 indeks sebesar 1.03 atau kurang;
- b. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi;
- c. Belum adanya regulasi atau peraturan daerah yang mendukung penyelenggaraan *E-Government*;
- d. Perlu peningkatan integrasi infrastruktur TIK dalam mewujudkan digitalisasi;
- e. Perlu peningkatan layanan kapasitas bandwidth penyelenggaraan intra pemerintah dalam

- rangka memujudkan penyelenggaraan SPBE;
- f. Masih rendahnya koordinasi, penyusunan dan evaluasi perangkat daerah tentang penyelenggaraan SPBE;
 - g. Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik belum optimal (*Smart Governance*);
 - h. Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informatika yang lain;
 - i. Belum optimalnya monitoring, pemeliharaan dan perawatan fasilitas sarana dan prasarana telekomunikasi.

3. Urusan Bidang Statistik

Penyelenggaraan statistik merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk memastikan kualitas dan relevansi data yang dihasilkan, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data. Selanjutnya statistik sektoral adalah statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dan statistik sektoral digunakan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan statistik di Kabupaten Asmat, adalah:

- a. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik;
- b. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral dan satu data;
- c. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan validasi, pengelolaan dan memperbarui data sektoral;
- e. Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal;

Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah, sehingga seringkali terjadi perbedaan data antara data Badan Pusat Stastik Kabupaten Asmat dan data yang dimiliki oleh OPD.

4. Urusan Bidang Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran atau kerusakan informasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan persandian di Kabupaten Asmat, adalah:

- a. Belum adanya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung bidang persandian;
- b. Kurangnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sandiman;

- c. Belum adanya penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah;
- d. Kurangnya perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
- e. Kurangnya kesadaran terhadap keamanan data dan informasi.

2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD yang Berisi Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD Dengan Analisis Kebutuhan

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD OPD)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						8,407,789,575							8,537,200,000			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8,407,789,575							8,537,200,000			
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7,755,554,575							7,856,200,000			
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5,658,284,000					-	-	5,785,700,000			
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30,000,000		-		Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-	-	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Lap	30,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4,543,100,000			-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-	-	4,600,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4,543,100,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		4,600,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	400,184,000			-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-	-	420,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					30 Paket	60,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		65,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.01.2. 0604		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang Disediakan				20 Paket	120,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		125,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.01.2. 0605		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	10,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		15,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.01.2. 0606		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dok	10,184,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		10,200,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.16.01.2. 0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Lap	200,000,000	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembang unan Pusat Pemerintah an Baru	-		205,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200,000,000			-	Pembang unan Pusat Pemerintah an Baru	-	-	215,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2. 0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	50,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembang unan Pusat Pemerintah an Baru	-		55,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2. 0709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembang unan Pusat Pemerintah an Baru	-		105,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.16.01.2. 0710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	50,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangun an Pusat Pemerintah an Baru	-		55,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	440,000,000			-	Pembangun an Pusat Pemerintah an Baru	-	-	460,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2. 0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5 Lap	30,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangun an Pusat Pemerintah an Baru	-		35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2. 0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Lap	100,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangun an Pusat Pemerintah an Baru	-		105,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.01.2. 0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Lap	10,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		15,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.01.2.0804			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap	300,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		305,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	45,000,000			-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-	-	55,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.01.2.0902		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	5,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		5,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.01.2.0906		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	20,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.01.2.0910		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3 Unit	20,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru	-		25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersedianya akses komunikasi dan informasi di seluruh wilayah tersedianya akses komunikasi dan informasi di seluruh wilayah	-			100 % 1 keg	1,754,910,000						-	1,705,000,000			
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Asmat	-			100 % 5 Orang	1,754,910,000				Konektivitas wilayah	-	-	1,705,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.02.2.0114	Relasi Media																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				27 Lap	175,668,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.02.2.0115			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat															
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				5 Komunitas	165,542,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		165,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.02.2.0116			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik															
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				3 Lap	152,200,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		155,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.16.02.2. 0117	Pelayanan Informasi Publik																
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan					4 Permoh onan	230,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivita s wilayah	-		235,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.02.2. 0119	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					30 Rekom endasi	274,500,000	Kab. Asmat, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivita s wilayah	-		240,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.02.2. 0120	Diseminasi Informasi							Kab. Asmat, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOM I KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	Konektivita s wilayah	-		180,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.16.02.2. 0121	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				27 Media	160,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		105,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.02.2. 0122	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				5 Dok	172,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		175,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.02.2. 0124	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				30 Orang	250,000,000	Kab. Asmat, Agats, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		300,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	342,360,575					-		365,500,000			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.16.03.2. 01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	90,000,000		-		Konektivitas wilayah	-	-	95,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.03.2. 0104	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa					30 Dok	90,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		95,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.03.2. 02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	252,360,575			-	Konektivitas wilayah	-	-	270,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.03.2. 0213	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																
		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional					5 Aplikasi	50,047,575	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		55,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.16.03.2. 0219	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					10 Dok	50,250,000	Kab. Asmat, Agats, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		55,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.03.2.0221		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	62,063,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		65,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.16.03.2.0230		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				30 PD	90,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		95,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						331,235,000							350,000,000			
1.	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-			-	145,000,000					-		150,000,000			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		KABUPATEN/KOTA																
	2.20.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	145,000,000			-	Penguatan ekonomi local berbasis Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan budaya lokal	-	-	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.20.01.2. 0108	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					27 Dok	90,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi local berbasis Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan budaya lokal	-		90,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.20.01.2. 0109	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					5 Data	55,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengentasan Kemiskinan	-		60,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	186,235,000						-	200,000,000			
	2.20.02.2. 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	186,235,000			-	Pengentas an Kemiskinan	-	-	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.20.02.2. 0107	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik					10 Orang	41,235,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pengentas an Kemiskinan	-		45,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.20.02.2. 0109	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																
		Percentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu					100 %	50,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pengentas an Kemiskinan	-		55,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.20.02.2. 0110	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				30 Dok	95,000,000	Kab. Asmat, Agats, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengestasan Kemiskinan	-		100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						321,000,000							331,000,000			
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		-	-		-	321,000,000						-	331,000,000			
	2.21.02.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-		-	271,000,000			-	Konektivitas wilayah	-	-	281,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.21.02.0101	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				2 Dok	55,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		60,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	2.21.02.0102	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3 Lap	55,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		55,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.21.02.2.0103		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Lap	101,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		101,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.21.02.2.0104		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				27 PD	60,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivitas wilayah	-		65,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
2.21.02.2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000			-	Konektivitas wilayah	-	-	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.21.02.2. 0201	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi					27 PD	50,000,000	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Konektivita s wilayah	-		50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
	J U M L A H							8,407,789,575							8,537,200,000			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok tanah air, sebagai langkah strategis untuk menghapus kesenjangandigital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah ini diiringi dengan digitalisasi data untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi antar lembaga, yang menjadi landasan pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Di sektor ekonomi, digitalisasi menjadi fokus utama untuk mendukung kemandirian bangsa, terutama dengan meningkatka inovasi teknologi seperti pertanian digital dan platform pembiayaan bagi UMKM.

Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan sumberdaya manusia unggul melalui program literasi digital dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta industri. Inovasi digital juga dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya Indonesia secara global, menjaga identitas nasional, dan menciptakan ekosistem digital yang kompetitif. Melalui visi ini, Kabinet Merah Putih menegaskan komitmennya menjadikan digitalisasi sebagai motor penggerak kemandirian bangsa di era digital melalui program transformasi sesuai Asta Cita Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan Digital dengan Visi Kementerian Komunikasi dan Digital tersebut di atas yaitu : "Bersama Idonesia Maju Menuju Indonesia Emas".

Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita yang meliputi yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam Negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Tujuan, Target dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah juga tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Untuk mendukung terwujudnya kondisi yang diharapkan pada tahun 2026, Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Asmat memiliki tujuan, target dan sasaran yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029.

3.2.1 Tujuan

Tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 adalah “**Meningkatnya Layanan Informasi Publik dan Ketersediaan Data Berbasis Digital yang Konsisten, Akurat dan Tepat Waktu**”. Artinya untuk memberikan informasi yang berkualitas tinggi dan mudah diakses oleh publik yang pada akhirnya akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

3.2.2 Target

1. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana;
3. Tersediaannya data statistik yang akurat dan berkualitas;
4. Memaksimalkan fungsi dan manfaat teknologi informasi;

3.2.3 Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan ke dalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat dari tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Permerintah Daerah;
3. Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan E-Government Pemerintah Daerah;

4. Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang Akurat dan Tepat Waktu;
5. Meningkatnya Kemaanen Data dan Informasi Perangkat Daerah.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Layanan Informasi Publik dan Ketersediaan Data Berbasis Digital yang Konsisten, Akurat dan Tepat Waktu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Kinerja)	BB	BB	BB	BB	A	A	A
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Permerintah Daerah	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	0	0	0,77	1,54	2,31	3,08	3,85
	Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan E-Government Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan / atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang Akurat dan Tepat Waktu	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (%)	1	2	2,6	3	3,2	3,5	3,7
	Meningkatnya Kemaanen Data dan Informasi Perangkat Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Masa Pemerintahan Daerah (%)	0,00	13,07	13,62	14,16	14,71	15,25	15,80

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika, bidang penyelenggaraan e-Government, bidang statistik dan bidang persandian di Kabupaten Asmat dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mengkonsolidasikan potensi dan permasalahan yang melingkupi tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Penyelenggaran pelayanan memiliki tantangan dan peluang pada setiap perangkat daerah demikian juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat. Tantangan adalah hal atau objek yang

menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau kesulitan yang menjadi rangsangan untuk bekerja lebih baik lagi. Adapun tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kapasitas bandwith internet penyelenggaraan intra pemerintah;
- 2) Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 3) Terbatasnya pemahaman perangkat daerah terhadap statistik sektoral;
- 4) Belum optimalnya data statistik sektoral terintegrasi melalui wali data dan satu data Indonesia;
- 5) Kurangnya kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan persandian dan kualitas keamanan informasi;
- 6) Masih rendahnya indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Selanjutnya peluang merupakan konsep yang mengacu pada kemungkinan atau potensi terjadinya suatu peristiwa dalam konteks situasi tertentu. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat, yakni:

- 1) Peningkatan kapastias bandwith internet dalam penyelenggaran intra pemerintah untuk menunjang SPBE;
- 2) Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- 3) Pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya kebutuhan akan data statistik sektoral;
- 4) Terwujudnya data statistik yang terintegrasi melalui Wali Data dan Satu Data Indonesia;
- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan persandian dan kualitas keamanan informasi;
- 6) Melakukan koordinasi dan evaluasi tingkat perangkat daerah agar tingkatkan indeks SPBE.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disertai Target Kinerja dan Pendanaan

Perencanaan Strategis tahun 2025-2029 dijabarkan kedalam suatu rencana pencapaian kinerja tahunan (RKT). RKT ini berisi *tentang* kegiatan yang akan dilaksanakan dan pendanaan kegiatan, output dan outcome dari kegiatan tersebut. RKT ini merupakan ukuran kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat dalam tahun 2026 dengan sebaiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi TUPOKSI dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat telah mengidentifikasi 4 (empat) sasaran dalam RENSTRA yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029. Rencana Strategis yang ada, akan diidentifikasi dengan indikator kinerja yang akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis berserta indikator kinerjanya, dirumuskan dari dokumen strategis yang telah ada.

b. Penetapan Program

Penetapan sasaran program berdasarkan informasi yang tercantum dalam perencanaan strategis.

c. Penetapan Kegiatan

Penetapan sasaran program berdasarkan informasi yang tercantum dalam perencanaan strategis.

d. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk acuan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator sasaran umumnya ditetapkan berdasarkan indikator *outcomes* (hasil), namun beberapa indikator sasaran berupa *output*, sedangkan untuk indikator kegiatan berdasarkan indikator *input*, *output* dan *outcomes*.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat menetapkan Rumusan Rencana Kerja tahun 2026 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Dinas Komunikasi & Informatika						7,584,437,187.56								7,088,098,000		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,584,437,187.56								7,088,098,000		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6,623,217,804.56								6,138,650,000		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4,677,440,762.56						-		4,874,450,000		
		[Tersedianya Fasilitas dan Pelayanan Penunjang Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan]	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	100	91.67	100	100	4,677,440,762.56	-	-	-	-	-	-		4,874,450,000	-	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	36,541,500			-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-		36,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB				
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2.16.01.2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	36,541,500	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		36,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika				
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3,362,122,244.56	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	2,984,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika				
	2.16.01.2.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35 Orang/bulan	3,362,122,244.56	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		2,984,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika				
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	535,413,018	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	423,310,000	Dinas Komunikasi & Informatika				
	2.16.01.2.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	27,981,812	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		29,110,000	Dinas Komunikasi & Informatika				
	2.16.01.2.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					15 Paket	156,198,406	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		148,300,000	Dinas Komunikasi & Informatika				
	2.16.01.2.0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	11,880,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		12,300,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														Dinas Komunikasi & Informatika		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	0	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		3,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														Dinas Komunikasi & Informatika		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15 Laporan	339,352,800	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		230,600,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	176,850,000			-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	731,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														Dinas Komunikasi & Informatika		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	176,850,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		130,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.0709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														Dinas Komunikasi & Informatika		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		451,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.0710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	0	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		150,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	527,514,000			-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	574,640,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	10,500,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		10,500,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	67,014,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		67,140,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	0	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		17,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan					12 Laporan	450,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		480,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	-	-	-	-	-	-	-	4,677,440,762.56	-	-	-	-	-	-	4,874,450,000	-		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	39,000,000			-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	125,500,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.01.2.0903	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	0	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		7,500,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
		[Tersedianya Fasilitas dan Pelayanan Penunjang Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan]	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	100	91.67	100	100	4,677,440,762.56	-	-	-	-	-	-	4,874,450,000	-		
	2.16.01.2.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	39,000,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		65,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
		-	-	-	-	-	-	4,677,440,762.56	-	-	-	-	-	-	4,874,450,000	-		
	2.16.01.2.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasrama Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		53,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	327,980,275					-		609,000,000			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		[Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah]	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	100 81.47	0 100	100 80	100 80.21	327,980,275	-	-	-	-	-	-	609,000,000	-		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	327,980,275			-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	609,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.02.2.0115	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komunitas		0	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats Kab. Asmat, Atsj, Atsy	-	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		150,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika	
	2.16.02.2.0117	Pelayanan Informasi Publik																
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				4 Permohonan	66,231,275	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		90,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.02.2.0119	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				8 Rekomendasi	102,117,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		124,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.02.2.0121	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				26 Media	44,400,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		75,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.02.2.0122	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Komunikasi Strategi Publik yang disusun	Strategi Publik			5 Dokumen	0	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		90,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.02.2.0124	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				4 Orang	115,232,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		80,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	1,617,796,767						-	655,200,000			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika]	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100 1.74	100 1.22	100 1.22	100 1.32	1,617,796,767	-	-	-	-	-	-	655,200,000	-		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-governement di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1,617,796,767	-	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	-	655,200,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.03.2.0213	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah diimplementasikan di Pusat Data Nasional				2 Aplikasi	0	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	55,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.03.2.0219	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	278,037,344	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	93,200,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.16.03.2.0224	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Pemerintah Kab/Kota				26 Perangkat Daerah	484,971,423	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	104,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB				
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2.16.03.2.0226	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				3 Dokumen	144,040,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		94,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika				
	2.16.03.2.0236	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				26 Perangkat Daerah	710,748,000	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		309,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika				
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						485,922,147							430,120,000					
1.	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				156,962,975							204,120,000					
		-	-	-	-	-	-	156,962,975	-	-	-	-	-	204,120,000	-					
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				156,962,975			-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	204,120,000	Dinas Komunikasi & Informatika				
	2.20.01.2.0108	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				26 Dokumen	91,026,160	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		71,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.20.01.2.0109	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				10 Data	65,936,815	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		133,120,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
2.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	-	-	-	328,959,172	-	-	-	-	-	-	226,000,000	-		
		[Meningkatkan Ketersediaan, Kualitas dan Aksesibilitas Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Relevan]	Percentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Percentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	82.35 8235	50.98	54.90	58.82	328,959,172	-	-	-	-	-	-	226,000,000	-		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	328,959,172	-	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	-	226,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.20.02.2.0120	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				30 Orang	106,236,135	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		105,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.20.02.2.0122	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				4 Laporan	222,723,037	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		121,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						475,297,236							519,328,000			
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	475,297,236							519,328,000			
		[Meningkatnya Pengamanan Informasi]	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan	76.92	61.54	65.38	69.23	475,297,236	-	-	-	-	-	-	519,328,000	-		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	410,265,236			-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	423,328,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.21.02.2.0105	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					5 Laporan	117,166,193	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	114,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.21.02.2.0106	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan					3 Laporan	70,424,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	94,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika			
	2.21.02.2.0107	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				26 Perangkat Daerah	96,199,795	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	113,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika			
	2.21.02.2.0108	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				2 Dokumen	126,475,248	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	102,328,000	Dinas Komunikasi & Informatika			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	65,032,000			-	Percepatan Pencegahan Stunting	-	-	96,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
	2.21.02.2.0202	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																
		Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.					3 Kegiatan	65,032,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pencegahan Stunting	-		96,000,000	Dinas Komunikasi & Informatika		
						J U M L A H	7,584,437,187.56						7,088,098,000					

4.2 Penelaan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Yaitu Hasil Kajian Terhadap Program/Kegiatan yang Diusulkan Para Pemangku Kepentingan (Termasuk Penelaahan Dari Arahan Bupati dan Hasil Reses/Aspirasi DPRD)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2026 melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk menjalankan kegiatan yang bersifat pelayanan publik yang merupakan rutinitas sebagai unsur penunjang.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat merupakan hasil rumusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat distrik hingga MUSRENBANG tingkat kabupaten. Tetapi dalam setiap pengusulan kegiatan harus sesuai dengan visi dan misi perangkat daerah. Aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan ini nantinya akan dialokasikan dalam rencana kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan. Tidak ada atau nihil terhadap usulan rencana program//kegiatan/sub kegiatan tahun 2026 yang merupakan usulan dari para pemangku kepentingan melalui MUSRENBANG tingkat distrik tahun 2025.

TABEL 4.2
USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KABUPATEN ASMAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
			N I H I L		

BAB V

P E N T U P

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) ini juga harus didukung penganggaran dari pemerintah daerah dan diharapkan sesuai dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan. Jika usulan ini disesuaikan atau dirasionalkan supaya tidak mengubah hal-hal yang menjadi substansi dari yang diusulkan. Pelaksanaan RENJA mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Apabila dalam perjalannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam RENJA tahun 2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat akan mengusulkan perubahan RENJA kepada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Asmat melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan. Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Mempunyai tanggung jawab bersama dalam melaksanakan program kegiatan di RENJA Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat serta menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, RENJA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain dalam program kegiatan, indikator dan target/sasaran;
2. RENJA Tahun 2026 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

5.3 Rencana tindak lanjut

RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat tahun 2026 selain menjadi acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026 serta berfungsi pula sebagai sarana acuan untuk peningkatan kinerja. Selain sebagai bahan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat. RENJA dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan RENJA di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.





PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Flor Rumlus Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Laman: www.kisp.asmatkab.go.id Kode Pos: 99777

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN ASMAT**

NOMOR: 500.12/400.1/KISP/X/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat tahun 2025-2029, perlu disusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf (a) konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat tahun 2026;
- c. penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
8. Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730)
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2012 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2013 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2023 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Asmat Nomor 71A Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 71A);
29. Peraturan Bupati Asmat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tanganan Elektronik;
30. Peraturan Bupati Asmat Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

: Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 08 Oktober 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Asmat di Agats;
2. Yang bersangkutan di Agats;
3. Arsip.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian
Nomor : 500.12/400.1/KISP/X/2025
Tanggal : 08 Oktober 2025

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
1	2	3	4
1.	Jamaluddin, S.Sos NIP. 19720728 200012 1 006	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Bartolomeus Bucupun, SE NIP. 19781114 200502 1 003	Sekretaris	Ketua
3.	Yosephus Y David, SE., M.KP NIP. 19781025 200909 1 001	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris
4.	Keez Izak S. Meokbun, ST NIP. 19790626 200909 1 001	Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika	Anggota
5.	Hendry Tammu, ST NIP. 19811101 201004 1 001	Kepala Bidang Statistik	Anggota
6.	Ruslan Yunus Masalisi, A.Md NIP. 19850111 200909 1 001	Plt. Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Moh. Kimamura A. M, SE NIP. 19721214 200605 1 001	Kepala Seksi Aplikasi Informatika	Anggota
8.	Yohanes Stefanus Uze, S.Kom NIP. 19910428 202011 1 001	Plt. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
9.	Bernadetha D. Helyanan, S.IP NIP. 19860629 201504 2 001	Kepala Seksi Analisa Data Statistik Bidang Distribusi dan Jasa	Anggota
10.	Yan Zeth Briyan Boseren, S.Tr.IP NIP. 20010610 202308 1 002	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 08 Oktober 2025



JAMALUDDIN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720728 200012 1 006